

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi

Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi adalah " **OPTIMALISASI PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG AMANAH** " hal itu untuk mengaktualisasikan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi periode 2008-2013 yang mengedepankan paradigma hijrah.

4.2 Misi

Misi yang dirumuskan untuk mencapai visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi adalah:

1. Meningkatkan Intensifikasi dan Ektensifikasi Pendapatan Daerah yang terukur dan berkualitas
2. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang professional
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya perbendaharaan, akuntansi anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan standar pelayanan minimal.

4.3 NILAI

Nilai-nilai yang ingin dicapai oleh seluruh aparat Dinas Pendaptan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah "**JITU**"

- (1) **Jujur** sebagai simbul dari akuntabel dan transparan;
- (2) **Ikhlas** sebagai simbul dari Proporsional, professional, harmonis demi kesejahteraan semua fihak;
- (3) **Teratur** sebagai simbul dari pelaksanaan system dan prosedur yang tidak bertentangan dengan hukum;
- (4) **Ulet** sebagai simbul dari rutinitas yang berkesinambungan dan progresif.

4.4 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai yaitu: *“Semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut dapat dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”* Seluruh aparat Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tidak punya niatan menyimpang dari peraturan yang berlaku, apalagi melibatkan diri baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam perbuatan KKN, namun bila disana sini masih terdapat kesalahan itu semata-mata karena proses pembelajaran untuk menyesuaikan dengan cepatnya perubahan peraturan, jadi wajar bila learning by doing. Dari tujuan yang diinginkan tersebut ditetapkan ke dalam tujuan strategik untuk mengimplementasikan misi yang terdiri dari:

1. peningkatan pendapatan dan pengawasan yang sinergitas;
2. meningkatkan sistem akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban SKPD yang akuntable dan professional;
3. terwujudnya aparatur pengelola pendapatan, keuangan, dan aset daerah yang berdedikasi tinggi bertanggungjawab serta memiliki wawasan dan keterampilan dalam mengelola pendapatan daerah, dan aset daerah.

4.5 Strategi

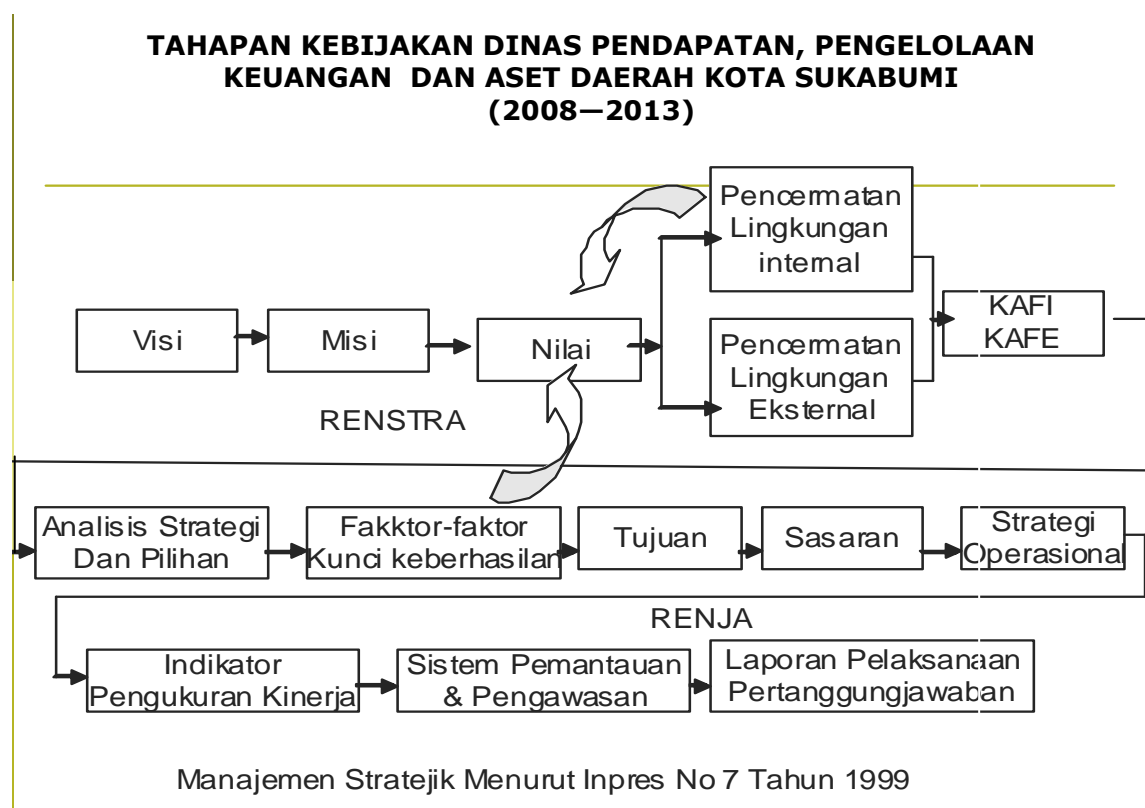
Strategi yang akan dilakukan adalah mengoptimalkan kekuatan internal yang sudah ada seperti halnya perda, kepwal, perwal, sidsur, sdm, potensi WP, pusat kegiatan wilayah dan kemauan politik untuk lebih sehat, lebih cerdas dan lebih sejahtera. Kemudian akan meminimalisir faktor kelemahan internal seperti halnya *tour of duty* dan *tour of area*, aplikasi reward and funishment, kelambatan penyesuaian terhadap penyesuaian tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik. Bahkan difihak lain mencari solusi terhadap ancaman masa depan seperti halnya fluktuasi ekonomi makro dan mikro yang tidak menentu, ketidaksabaran masyarakat serta intervensi semua lembaga dalam pemeriksaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah yang bertumpuk pada waktu yang bersamaan.

Dari gambaran tersebut disusunlah strategi yang akan dilaksanakan terdiri dari 6 strategi yaitu;

1. optimalisasi pengawasan, pengendalian internal, dan pengkoordinasian pendapatan sesuai regulasi di bidang pajak dan daerah;
2. pengkajian rencana anggaran pendapatan, belanja dan aset daerah untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja daerah yang akuntabel;
3. pemenuhan kebutuhan dalam pelayanan administrasi perkantoran dan pengelolaan administrasi aset daerah sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD;
4. peningkatan sistem pengelolaan administrasi pendapatan dan belanja daerah;
5. peningkatan dan optimalisasi sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan prima;
6. peningkatan profesionalisme aparatur sesuai tuntutan kebutuhan pemenuhan SDM yang handal.

4.6 Kebijakan

Kebijakan, mensinergikan lingkungan strategis dalam bentuk IFAS dan EFAS dengan memperhatikan faktor penentu keberhasilan dan kegagalan dalam critical success factors untuk menemukan leverage sebagai daya ungkit permasalahan yang rumit dan kompleks disederhanakan dalam penanganan yang sistemik, untuk itu dalam implementasinya dilakukan langkah-langkah yang tergambar dalam diagram sebagai berikut:



Arahan kebijakan yang dirumuskan dalam menentukan program dan kegiatan adalah:

1. Sistem pengelolaan pendapatan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang memperhatikan perkembangan dampak ekonomi makro dan mikro;
2. Pola kemitraan pemerintah dan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah;
3. Peningkatan kualitas pelayanan prima bidang administrasi perkantoran;
4. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan SKPD yang transparan dan bertanggungjawab yang tersaji dalam suatu proses manajemen;
5. Pemenuhan kebutuhan sarana parasarana dalam penunjang sistem pelayanan prima;
6. Mengembangkan potensi kemampuan personil sesuai bidang tanggungjawabnya serta penerapan reward dan funishment terhadap prestasi yang terukur.